

## **PERAN FORUM PEMERHATI MASYARAKAT LOA KULU (FPMLK) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA JEMBAYAN KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**Muhammad Adirani Gozali<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu yaitu dari indikator Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu Desa Jembayan sebagai Penyelenggara, Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu Desa Jembayan sebagai Penyalur dan Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu Desa Jembayan sebagai Pendamping. Hambatan yang ditemukan dalam membangkitkan peran masyarakat dalam Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu Desa Jembayan adalah masyarakat belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi dan tanggung jawab, serta kurang memiliki apa yang telah dibangun. Hal ini akibat masih lemahnya peran dan fungsi pemerintah desa di dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan dan kurangnya motivasi dari penyalur. Untuk perbaikan dari kegiatan Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu Desa Jembayan dan masyarakat berpartisipasi yakni perlu adanya perhatian pemerintah baik desa maupun kecamatan serta penyelenggara dalam menasionalisasikan, mengajak, dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, diharapkan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara langsung.*

***Kata Kunci :*** Peran, Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK)

### **Pendahuluan**

Usaha-usaha pembangunan yang banyak dilakukan negara sedang berkembang dalam pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan, misalnya masalah kemiskinan dan tidak stabilnya distribusi pendapatan. Kegagalan-kegagalan tersebut menimbulkan dorongan bagi para ilmuwan, untuk memperoleh pengetahuan mereka mengenai masalah yang mempengaruhi sebagian besar umat manusia di Bumi ini. Sejak itu aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan telah menjadi titik pusat perhatian.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, memberikan arah bagi pembangunan negaranya melalui perencanaan-perencanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh, terpadu dan terus menerus sebagaimana tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Lebih spesifik lagi untuk masalah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Adirani751@gmail.com

perencanaan pembangunan ekonomi, Indonesia memiliki apa yang disebut dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang memuat perencanaan-perencanaan pembangunan beserta dengan anggaran pemasukan dan pengeluarannya. Di dalam APBN ini tertuang kebijakan-kebijakan perekonomian Indonesia dalam jangka pendek (satu tahun) yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut, dilain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki *grand strategy* pembangunan yang disebut GERBANG RAJA. Gerbang Raja menjadi suatu konsepsi mengenai gambaran pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimasa mendatang, secara filosofis, Gerbang Raja menjadi ciri khas atau model pendekatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang di tempatkan sebagai pengarusutamaan pembangunan (*mainstream development*) yang mewarnai seluruh kebijakan dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Maka dari itu pemerintah mengadakan proses pemerataan akses kesempatan bagi masyarakat pedesaan yang merupakan bagian dari upaya penguatan kemampuan masyarakat untuk memperluas pilihan-pilihan baik dalam proses kegiatan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, di samping itu juga masyarakat diharapkan agar dapat berperan dan ikut serta di dalam pembangunan.

Pembangunan cenderung terpusat pada kawasan perkotaan sehingga masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumberdaya ekonomi dan cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya dibandingkan di daerah pedesaan. sehubungan dengan hal tersebut perlu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas agar kesenjangan di dalam masyarakat berkurang.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Terkait dengan tujuan meningkatkan daya saing daerah maka salah satu faktor kunci pembangunan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) maupun binaan. Sumber daya alam maupun binaan merupakan modal dasar pembangunan, sekaligus media bagi kelangsungan aktivitas masyarakat dalam rangka kehidupan dan penghidupan. Pengelolaan kedua sumberdaya

tersebut merupakan upaya-upaya yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, dimana lingkup pengelolaannya sendiri telah menjadi bagian pelaksanaan urusan sebagaimana PP No. 38 Tahun 2007. Sehingga, sudah tentu pengelolaan sumber daya alam juga merupakan bagian dari wilayah kerja perangkat daerah sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat bab V kepengurusan dan susunan organisasi. Suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya akan selalu berhadapan dengan manusia sebagai sumberdaya yang dinamis dan memiliki kemampuan untuk terus berkembang, dimana dengan berkembangnya kemampuan manusia. Ketidakberdayaan masyarakat menghadapi perubahan lingkungan menyebabkan lemahnya masyarakat beradaptasi terhadap perubahan ekosistem yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat ini dapat menyebabkan kesenjangan yang semakin meluas antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, maupun antara masyarakat dengan pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan besar, yang pada gilirannya dapat berujung pada konflik sosial yang berkepanjangan.

Kesenjangan dalam akses sumberdaya ekonomi antara pihak-pihak terkait, diantara masyarakat asli dengan pendatang, perusahaan besar dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara berpotensi menjadi sumber konflik sosial, Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dapat menjadi salah satu solusi konflik yang efektif di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keinginan dan kebutuhan masyarakat pada era globalisasi saat ini semakin kompleks, sehingga tidak mungkin dapat dipenuhi dengan usaha sendiri maka diperlukan wadah atau organisasi untuk merealisasikan kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai. Suatu organisasi akan mencapai tujuannya jika dikelola dengan baik, hanya saja keberhasilan untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan, tidak lagi hanya di tentukan oleh keberhasilan penerapan prinsip-prinsip organisasi.

Organisasi yang baik, tumbuh dan berkembang akan menitikberatkan pada sumber daya manusia (*human resources*) guna menjalankan fungsinya dengan optimal, khususnya menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Dengan demikian kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral dari para pelaku organisasi/perusahaan disemua tingkat (*level*) pekerjaan sangat dibutuhkan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa berjalan dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Tjokroamidjojo & Mustopadidjaya, 1988; Siagian, 1985).

Beberapa organisasi memandang karyawan dengan keterampilan superior sebagai sumber utama keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Dalam organisasi ini, pelatihan menjadi alat yang penting untuk menciptakan kesiapan dan fleksibilitas untuk perubahan lintas semua organisasional dan ada kaitan kuat antara semua sisi sistem pelatihan dan proses kepemimpinan strategik dan perencanaan bisnis.

Kesiapan dan fleksibilitas dicapai melalui pengawasan, manajemen dan pelatihan eksekutif, karena individu ini menetapkan batas untuk modifikasi dan peningkatan berkelanjutan praktek organisasi yang eksis. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial.

Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Dalam rangka mengurangi secara perlahan kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat maka beberapa tokoh pemuda Loa Kulu membuat suatu forum pemerhati masyarakat pada tahun 2004 dengan didukung 12 kepala desa sekecamatan Loa Kulu. Dengan adanya forum tersebut sebagai organisasi di Loa Kulu yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masyarakat Loa Kulu, dalam penelitian ini khususnya Desa Jembayan.

Menurut UU No.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, dimana sumber dana keuangan lembaga swadaya masyarakat dapat diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, usaha yang lain yang sah.

Lembaga swadaya masyarakat atau FPMLK ini dana yang mereka dapatkan murni dari pendistribusian dana royalti batu bara PT. Mega Prima Persada (MPP), yang disalurkan ke tiap desa di Kecamatan Loa Kulu, salah satunya Desa Jembayan. Pembagian dana royalti disetiap bulannya tidak menentu tergantung jumlah pendapatan dari PT. Mega Prima Persada (MPP) . selanjutnya dana bagi hasil ini berdasarkan kerjasama antara Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu sebagai pemilik 1000 hektar lahan batu bara yang digarap oleh PT. Mega Prima Persada (MPP).

Setelah penulis melakukan observasi di Desa Jembayan, hasil yang didapatkan menurut salah satu warga Desa Jembayan bahwa forum tersebut banyak membantu dalam segala aspek antara lain kesehatan, keagamaan, pendidikan, bantuan sosial dan lain-lain. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, kendala tersebut berupa sebagian warga Desa Jembayan tidak menerima sepenuhnya keberadaan forum ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan akhirnya memilih judul untuk penulisan skripsi ini yaitu “Peran Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK) Dalam Pembangunan di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu dalam pembangunan di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Peran Pemerhati Masyarakat Loa Kulu dalam pembangunan di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara ?

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Peran***

Menurut Soekanto, (2002). Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Suhardono (1994). Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.

Menurut Horton dan Hunt (1993), Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status, dan

Menurut Merton (1968), Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada suatu status dinamakan perangkat peran.

#### ***Organisasi***

L. F. Urwick (2003) mendefinisikan bahwa organisasi-organisasi lebih dari hanya alat untuk menciptakn barang-barang, dan menyelenggarakan jasa-jasa. Organisasi menciptakan kerangka, dimana banyak diantara kita melaksanakan proses kehidupan.

Sebuah organisasi tidak akan bisa lepas dengan yang namanya struktur organisasi. Karena struktur organisasi adalah cara suatu aktivitas organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasikan

#### ***Budaya Organisasi***

Schein (dalam Hessel Nogi 2005) secara komprehensif budaya organisasi didefinisikan sebagai pola asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh kelompok dalam suatu organisasi sebagai alat untuk memecahkan masalah terhadap penyesuaian faktor eksternal dan integrasi faktor internal, dan telah terbukti sah, dan oleh karenanya diajarkan kepada para anggota organisasi yang baru sebagai

cara yang benar untuk mempersiapkan, memikirkan dan merasakan dalam kaitannya dengan masalah-masalah yang dihadapi.

Robbins (2005) budaya organisasi cukup didefinisikan sebagai sebuah persepsi umum yang dipegang teguh oleh para anggota organisasi dan menjadi sebuah sistem yang memiliki kebersamaan pengertian.

### ***Tugas Dan Fungsi Organisasi Masyarakat***

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi hak dan kewajiban. Organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai wadah penyalur sesuai kepentingan anggotanya, wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi, wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional, sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota, dan/atau antar organisasi kemasyarakatan, dan antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pasal 6, Organisasi Kemasyarakatan berhak: melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 7, Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8, Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

### ***Masyarakat***

Chambers dalam Anholt (2001) Masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan.

Buchori (1993) Pemahaman dalam pemberdayaan masyarakat memerlukan sikap yang subjektif dalam penelitiannya, subjektifitas ini bertolak dari sikap dasar bahwa setiap penelitian tentang suatu permasalahan sosial selalu dilakukan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada, untuk meluruskan ketimpangan yang ada, dan bukan hanya melukiskan serta menerangkan kenyataan yang ada

### ***Pengertian Masyarakat***

Fandi Tjiptono (2006), Masyarakat adalah masyarakat kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama.

Dwipayana dkk (2001), Masyarakat yaitu dari “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### ***Pembinaan***

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Depdikbud,2000) dijelaskan pembinaan “sebagai proses, perbuatan, atau cara membina”. Arti dapat ditelusuri dari kata dasar bina sehingga menjadi proses, perbuatan, atau cara.

Menurut Pamudji (2001) bahwa: Pembinaan berasal dari kata ”bina” yang berarti sama dengan ”bangun”, jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi.

Menurut Soetopo, H. dan Soemanto, W (2001) bahwa “pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada”. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan.

### ***Pengembangan Masyarakat***

Korten, (2001), pada hakikatnya semua pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pembangunan terhadap masyarakat desa dipusatkan pada mereka (*people centered development*) melalui suatu gerakan yang dinamakan pengembangan masyarakat (*community development*)

Brokensha dan Hodge (2003) pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat.

Dunham (2003) yang mengatakan pengembangan masyarakat merupakan berbagai upaya yang terorganisir yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha yang kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela.

### ***Pengertian Pembangunan***

Saul M. Katz (dalam Yuwono, 2001) mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai.

Bachtiar Effendi (2002) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan seluruh sumberdaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan adil.

Afiffuddin (2010) Pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Kantor Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK), dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik Purposive Sampling dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data penelitian lapangan (*field work research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai Peran Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu Dalam Pembangunan di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Peran Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK)**

Peran dari Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu Dalam Pembangunan di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu untuk memberikan pembinaan diberbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, kepemudaan, agama, bencana maupun kemiskinan yang terjadi di wilayah Kecamatan Loa Kulu Kutai Kartanegara. Hal ini merupakan suatu bentuk yang nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada saat ini. Pembangunan di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengetahui peran Forum Pemerhati Masyarakat Desa Jembayan ada beberapa indikator yang menjadi pembahasan sebagai berikut :

#### ***Forum Pemerhati Masyarakat Sebagai Penyelenggara***

Peran FPMLK sebagai penyelenggara di Desa Jembayan adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai penyelenggara, FPMLK selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di kelurahan hingga kecamatan dan pemerintah kabupaten.



Agar dapat menjadi penyelenggara yang baik ada beberapa indikator yang dikaji di dalamnya sebagai berikut :

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggung jawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan disegala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang ekonomi yang berbentuk bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan kelurahan mereka dan juga harus bertanggung jawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbangdes sekecamatan.

Masyarakat juga ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan baik di tingkat desa maupun kecamatan. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing desa dan mendesak untuk dilaksanakan

### ***Forum Pemerhati Masyarakat Sebagai Penyalur***

Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu sebagai penyalur dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. FPMLK Desa Jembayan mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat.

Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan, kegiatan FPMLK tidak akan berjalan bila tidak adanya peran serta dari masyarakat, sebab masyarakat tidak mau menghadiri rapat jika tidak ada orang yang menggerakkan. Kebijakan pemerintah desa memberikan dukungan terhadap Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan di desa tempat mereka tinggal.

Serta masyarakat yang berpartisipasi dalam program pembangunan juga harus menerima informasi termasuk sosialisasi tentang kegiatan yang akan dibuat oleh FPMLK, namun kegiatan pembangunan yang dibuat tidak akan berjalan jika masyarakat tidak ikut memberikan informasi tentang pembangunan yang akan dibuat maupun memberikan informasi yang didapat kepada orang lain yang tidak hadir pada saat rapat FPMLK Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

### ***Forum Pemerhati Masyarakat Sebagai Pendamping***

Bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, FPMLK jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas

Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FMPLK) kelurahan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan keikutsertaan dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan forum pemerhati masyarakat yang ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah demi kemajuan pembangunan di wilayah Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FMPLK) melakukan evaluasi pada program pembangunan dengan kata lain peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan dari pihak FPMLK itu sendiri secara bersama-sama oleh masyarakat Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Peran masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap mau ikut memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Forum Pemerhati Masyarakat Lao Kulu (FPMLK)**

#### ***Faktor Pendukung***

Dari hasil penelitian yang diperoleh, ditemukan beberapa faktor pendukung peran Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu Desa Jembayan diantaranya dalam upaya pembangunan di Desa Jembayan oleh Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK) Desa Jembayan telah ditemukan beberapa faktor pendukung diantaranya :

- a. Alokasi dana yang diperoleh dari berbagai elemen dari hasil royalti baik swasta maupun pemerintah setempat.
- b. Kemampuan tenaga kerja dan fasilitas yang cukup memadai, walaupun banyak terdapat hambatan tetapi dapat diatasi.

#### ***Faktor Penghambat***

Dari hasil penelitian yang diperoleh, ditemukan beberapa faktor penghambat peran Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu (FPMLK) Desa jembayan diantaranya dalam upaya peran FPMLK di Desa jembayan telah ditemukan beberapa faktor penghambat diantaranya :

- a. Sumber Daya Manusia  
Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program kerja organisasi ialah kualitas sumber daya manusia itu sendiri atau dalam hal ini yang dimaksud ialah sumber daya para pelaksana layanan.
- b. Sarana dan Prasarana  
Dalam kinerja sangatlah dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung sehingga program kerja yang dilaksanakan oleh FPMLK Desa Jembayan dapat berjalan dengan maksimal.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Peran Forum Pemerhati Masyarakat sebagai penyelenggara masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Hal ini terlihat dari hasil wawancara oleh Ketua Forum Permehati Masyarakat Loa Kulu Desa Jembayan bahwa dalam penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi *no coment*. Masyarakat beranggapan FPMLK tidak bisa berbuat apa-apa.

Peran Forum Pemerhati Masyarakat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang dimana program kerjanya sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat FPMLK kelurahan untuk masyarakat. Dari kondisi ini, mengindikasikan Peran FPMLK selaku lembaga swadaya masyarakat sebagai penyalur telah melaksanakan pertemuan antar masyarakat dan perangkat di Desa Jembayan. Dalam pertemuan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dan menyampaikan hambatan-hambatan yang ada di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peran Forum Pemerhati Masyarakat sebagai pendamping masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan perangkat desa yang mengatakan sendiri bahwa jika program tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program Forum Pemerhati Masyakat Loa Kulu tersebut.

### ***Saran***

Diharapkan kepada pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan untuk memberikan perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, menghimbau atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi sehingga FPMLK Desa Jembayan tidak berjalan dengan sendiri serta perlu adanya pemahaman yang baik tentang alur dan tahapan program kerja FPMLK Jembayan dan peran FPMLK Desa Jembayan agar lebih memotivasi masyarakat agar kemandirian masyarakat dapat terwujud.

Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung di dalam Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu di Desa Jembayan baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk ikut serta dalam pembangunan di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Daftar Pustaka**

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Cides, *Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan*, Jakarta 1996.
- Effendi, bachtiar.2002. *Pembangunan daerah otonom berkeadilan* : UHAINDO media & offset.
- Hubeis, Aida Vitalaya Sjafri, Ruwiyanto, Wahyudi, Tjiptopranto, Prabowo, (1995). *Penyuluh Pembangunan Indonesia: Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Pastaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Miles, Methew B. Dan A. Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI-Press: Jakarta.
- Moleong J Lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rasdakarya.
- Penjelasan II *Fasilitas dan Pelatihan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* Tahun 2008.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan. 2010 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Gravindo Persada: Jakarta.
- Sugiono, 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Suhandono, Edy, 1994. *Teori Peranan Konsep Derivasi dan Implikasinya*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanto-Sunaryo, Astrid, S., 1996. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Sunyoto Usman,2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, !996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Usman, Husaini dan A.S., Purnomo, 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Usman, Sunyoto, 1998. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.

Yurwono, Teguh, 2007. *Manajemen Otonomi Daerah Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Clogapps di Ponegoro University: Semarang.

**Dokumen-dokumen :**

Undan,-Undang, 1985 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 *Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 5 Fungsi, Hak dan Kewajiban Organisasi*.

\_\_\_\_\_, 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 *Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*.

*Profil Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu 2013*

*Laporan Kerja Forum Pemerhati Masyarakat 2014*